

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	
Media Online	Radar Solo

Wilayah: Kabupaten Klaten

Pemkab Klaten Makin Blak-blakan soal Anggaran

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/20/08/2022/pemkab-klaten-makin-blak-blakan-soal-anggaran/>

KLATEN – Tidak ada yang ditutup-tutupi terkait pengelolaan anggaran di Pemkab Klaten. Masyarakat bisa langsung mengaksesnya di *website* badan publik. Berisi rincian anggaran, program, kegiatan, dokumen perencanaan, dan pelaporan.

Bukan hanya itu, pengadaan barang jasa, profil badan publik, hingga laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dapat diakses secara transparan.

Agar transparansi anggaran lebih optimal, mulai tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi. Tujuannya, anggaran badan publik di lingkungan Pemkab Klaten kian mudah diakses publik.

"Untuk kali pertama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diskominfo melakukan pemeringkatan," ucap Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa, Jumat (19/8).

Diterangkannya, sebelumnya, anggaran hanya diketahui bendahara dan unsur pimpinan. Tapi sekarang masyarakat bisa mengakses anggaran pemerintah. Termasuk program dan kegiatan badan publik bersangkutan.

Ada pun metode penilaian pemeringkatan menggunakan tiga tahapan. Meliputi pengisian *self assesment questionnaire* (SAQ), verifikasi, dan visitasi faktual.

"Kuncinya di SAQ. Badan publik tidak bisa menjawab pertanyaan jika tidak mengunggah informasi publik di *website*. Maka kami memaksa secara tidak langsung bagi pejabat publik untuk menghidupkan *website*-nya," beber Amin.

Terkait kekurangan yang perlu diperbaiki, Amin menyebut terkait sarana untuk mendukung layanan informasi publik. Begitu ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

"Meja layanan informasi masih jadi pekerjaan rumah. Apalagi meja layanan itu bagian dari standar, maka tetap harus ada. Biar pun sederhana, meja layanan informasi dan kelengkapan wajib disediakan setiap badan publik," tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Ngawen dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten terpilih sebagai badan publik terbaik dalam mengelola informasi publik.

Itu didasarkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Klaten 2022 oleh Diskominfo Klaten. Pemerintah Kecamatan Ngawen ditetapkan menjadi badan publik terbaik dengan nilai 93,3, sedangkan BPKPAD Klaten 90,3.

Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan langsung piagam penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Klaten, Rabu (17/8). Bertepatan malam resepsi peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

"Saya berharap prestasi ini menjadi semangat. Selanjutnya jajaran Pemkab Klaten harus bekerja keras membuat inovasi di tahun-tahun berikutnya," terang Mulyani. (ren/wa)